



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 252143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.165.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.015.000.000
2. Tanah Seluas 2008 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **591.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.500.000
4. LAINNYA, POLGYGON SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
5. MOBIL, TOYOTA COROLLA DX Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
7. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



8. LAINNYA, SPECIALIZED SEPEDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000

9. MOBIL, MITSUBSHI PAJERO SPORT 2021 Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

10. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 93.000.009

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.599.225.800

F. HARTA LAINNYA Rp. 415.000.000

Sub Total Rp. 5.863.225.809

III. HUTANG Rp. 82.586.755

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.780.639.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.